

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN 2014



<http://banjarmasinkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARMASIN**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN 2014



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN 2014

© 2015 : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

ISBN : 978-602-6900-04-3
Nomor Publikasi : 63710.15.15
Katalog BPS : 4102004.6371
Ukuran Buku : 16,51 cm × 21,51 cm
Jumlah Halaman : xi + 66 halaman
Naskah : Seksi Statistik Sosial
Desain Sampul : Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi yang menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat di Kota Banjarmasin. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas yang tidak semuanya dapat diukur. Tulisan ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedianya data. Informasi umum tentang kesejahteraan yang tercakup dalam tulisan ini antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi serta perumahan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012-2013 yang sudah disesuaikan dengan data penduduk hasil proyeksi (backcasting), Susenas tahun 2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) keadaan Agustus tahun 2012-2014.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan publikasi mendatang sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Banjarmasin, November 2015

Badan Pusat Statistik
Kota Banjarmasin
Kepala,



Ir. H. RISMANTO, MP.

NIP. 19630522 199102 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2.. Ruang Lingkup dan Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB 2 KEPENDUDUKAN	6
2.1. Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk	7
2.2. Komposisi Penduduk	11
BAB 3 KESEHATAN	15
3.1. Derajat Kesehatan Masyarakat	16
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	17
3.3. Kesehatan Balita	19
BAB 4 PENDIDIKAN	23
4.1. Angka Melek Huruf	24
4.2. Rata-Rata Lama Sekolah	25
4.3. Tingkat Pendidikan	26

4.4.	Tingkat Partisipasi Sekolah	29
4.5.	Angka Putus Sekolah	31
BAB 5	FERTILITAS	33
5.1.	Umur Perkawinan Pertama	33
5.2.	Partisipasi Keluarga Berencana	35
BAB 6	KETENAGAKERJAAN	39
6.1.	Penduduk Angkatan Kerja	40
6.2.	Penduduk Bekerja	44
6.3.	Pengangguran	49
6.3.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	49
6.3.2.	Tingkat Pengangguran Terdidik	51
6.4.	Tingkat Kesempatan Kerja	51
BAB 7	PERUMAHAN DAN TIK	54
7.1.	Penguasaan Tempat Tinggal	54
7.2.	Kondisi Tempat Tinggal	55
7.2.1.	Luas Lantai Tempat Tinggal	55
7.2.2.	Jenis Material Terluas	56
7.3.	Fasilitas Perumahan	57
7.4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	59
BAB 8	KONSUMSI / PENGELUARAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Banjarmasin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2014	7
Tabel 2.2.	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2014	10
Tabel 2.3.	Rasio Ketergantungan, 2014	10
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2014	12
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur, 2014	13
Tabel 2.6.	Persentase Penduduk Menurut Status dalam Rumah Tangga, 2014	13
Tabel 3.1.	Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013	16
Tabel 3.2.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir, 2014	19
Tabel 3.3.	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis dan Frekuensi Imunisasi, 2014	21
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan baca Tulis dan Kelompok Umur, 2014	24
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Sekolah, 2014 .	26
Tabel 4.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2014	27
Tabel 4.4.	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014	31
Tabel 6.1.	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	41
Tabel 6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	42

Tabel 6.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	43
Tabel 6.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014	44
Tabel 6.5.	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014	45
Tabel 6.6.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2014	45
Tabel 6.7.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	46
Tabel 6.8.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	47
Tabel 6.9.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal/ Informal dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	48
Tabel 6.10.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	48
Tabel 6.11.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin, 2014	48
Tabel 6.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014	50
Tabel 6.13.	Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	51
Tabel 6.14.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014 ..	51
Tabel 6.15.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kelompok Umur, Agustus 2014	52

Tabel 7.1.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2014	55
Tabel 7.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Rumah Tangga, 2014	55
Tabel 7.3.	Persentase Luas Lantai Per Kapita Menurut Kriteria Rumah Sehat, 2014	56
Tabel 7.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, 2014	57
Tabel 7.5.	Persentase Penggunaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2014	59
Tabel 8.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Bulan, 2014	62
Tabel 8.2.	Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2014	62
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Bulan untuk Kelompok Makanan dan Non Makanan, 2014	63
Tabel 8.4.	Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Barang, 2014	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Penduduk Banjarmasin Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014.....	6
Gambar 2.2.	Persebaran Penduduk Banjarmasin, 2014	8
Gambar 2.3.	Kepadatan Penduduk Banjarmasin Per Kecamatan, 2014asio Ketergantungan	8
Gambar 2.4.	Rasio Jenis Kelamin, 2014	8
Gambar 2.5.	Perkembangan Penduduk Banjarmasin Tahun 2012-2014.....	9
Gambar 2.6.	Piramida Penduduk Kota Banjarmasin, 2014	9
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Tiga Keluhan Kesehatan Terbanyak Tahun 2014	16
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Umur, 2014.....	17
Gambar 3.3.	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jumlah Hari Terganggu, 2014	17
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Cara Berobat, 2014	18
Gambar 3.5.	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Obat Yang Digunakan, 2014	18
Gambar 3.6.	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Tempat Berobat, 2014	18
Gambar 3.7.	Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Yang Pernah Mendapat ASI Menurut Lama Disusui, 2014	20
Gambar 3.8.	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya, 2014	21

Gambar 4.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, 2014.....	24
Gambar 4.2.	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2010-2014	25
Gambar 4.3.	Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah Menurut Kelompok Umur, 2014	26
Gambar 4.4.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014.....	28
Gambar 4.5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2014	29
Gambar 4.6.	Angka Partisipasi Kasar(APK) Menurut Jenis Kelamin, 2014	30
Gambar 4.7.	Angka Partisipasi Murni(APM) Menurut Jenis Kelamin, 2014	30
Gambar 4.8.	Persentase Penduduk 5-25 Tahun Menurut Alasan Terbanyak Putus Sekolah, 2014	31
Gambar 5.1.	Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Keatas Menurut Umur Kawin Pertama, 2014	34
Gambar 5.2.	Proporsi WUS Berstatus Kawin Menurut Kelompok Umur dan Keterangan Ber-KB, 2014	35
Gambar 5.3.	Persentase WUS Berstatus Kawin Menurut Alat/ Cara KB Yang Sedang Digunakan, 2014	36
Gambar 5.4.	Persentase WUS Yang Tidak Pernah Ber-KB Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan, 2014	37
Gambar 5.5.	Persentase WUS Berstatus Kawin Menurut Tingkat Pendidikan dan Keterangan Ber-KB, 2014	37
Gambar 6.1.	Diagram Ketenagakerjaan	40
Gambar 6.2.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2014	42

Gambar 6.3.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2014	44
Gambar 6.4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2014	46
Gambar 6.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka 2012-2014	49
Gambar 6.6.	Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Penyebabnya, Agustus 2014.....	50
Gambar 7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2014.....	56
Gambar 7.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2014	57
Gambar 7.3.	Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2014	58
Gambar 7.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2014	58
Gambar 7.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Memasak, 2014	59
Gambar 7.6.	Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Menurut Lokasi /Media Internet, 2014	60
Gambar 7.7.	Persentase Pengguna Internet Menurut Tingkat Pendidikan, 2014	60
Gambar 8.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Bulan untuk Kelompok Makanan dan Non Makanan, 2014	63

<http://banjarmasinkota.bps.go.id>

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan lebih baik atau manusiawi (Todaro, 2000 dalam Sudiro, 2002). Pembangunan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita.

Tetapi pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut, konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan kembali (*redefined*). Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang telah *redefined* tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut di antaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/ perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial : Program Keluarga harapan (PKH), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, BLT, bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, dll program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut dapat memberi petunjuk sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan memberikan hasil bagi masyarakat dan dapat mengetahui indikator yang belum memberikan hasil optimal sehingga dapat dijadikan salah satu fokus pembangunan selanjutnya.

1.2 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat ini mencakup semua bidang sosial ekonomi antara lain: Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, dan Ketenagakerjaan, Konsumsi, dan indikator kesejahteraan lainnya. Penerbitan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dengan tercapainya tujuan pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Banjarmasin.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

1.3. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk materi agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;
2. Untuk materi kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, dan konsumsi/ pengeluaran diperoleh dari Susenas 2014;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2014.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2015 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan, serta Sistematika Penyajian.
- Bab 2 menyajikan tentang Kependudukan.
- Bab 3 menyajikan tentang Kesehatan.
- Bab 4 menyajikan tentang Pendidikan.
- Bab 5 menyajikan tentang Fertilitas.
- Bab 6 menyajikan tentang Ketenagakerjaan.
- Bab 7 menyajikan tentang Perumahan.
- Bab 8 menyajikan tentang Konsumsi/ Pengeluaran.

<http://banjarmasinkota.bps.go.id>

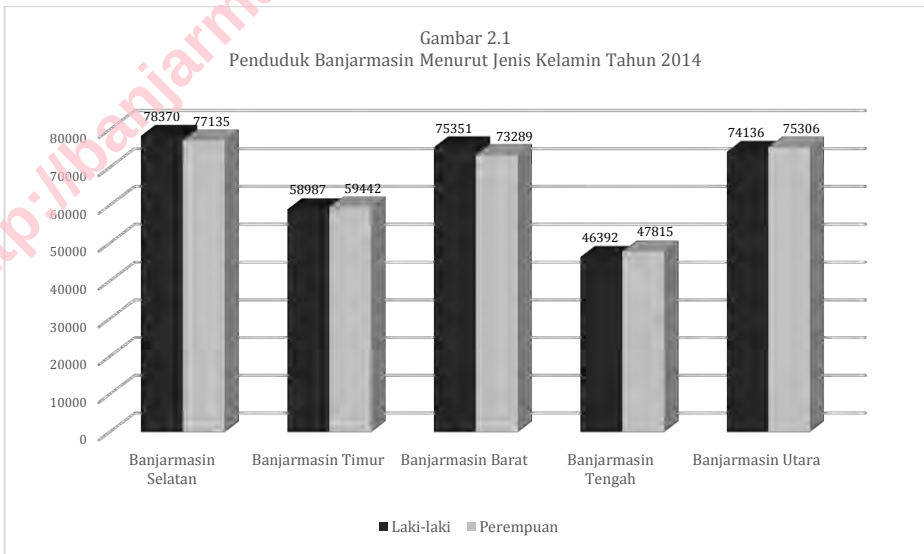
KEPENDUDUKAN



BAB 2

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan pisau bermata dua bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial, namun di sisi lain keberadaan jumlah penduduk yang besar dapat merupakan beban bagi pembangunan. Penduduk sebagai beban pembangunan terjadi jika jumlah penduduk yang besar tidak disertai dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Guna menunjang keberhasilan pembangunan, penanganan permasalahan penduduk tidak hanya mengarah pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDMnya. Oleh karena itu, informasi tentang komponen-komponen kependudukan seperti jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan selanjutnya.



Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk 2014

2.1 JUMLAH, PERSEBARAN, DAN KEPADATAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2014 adalah 666.223 orang. Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 98,46 km² ini memiliki kepadatan penduduk 6.766 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2014

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Banjarmasin Selatan	78.370	77.135	155.505
020 Banjarmasin Timur	58.987	59.442	118.429
030 Banjarmasin Barat	75.351	73.289	148.640
031 Banjarmasin Tengah	46.392	47.815	94.207
040 Banjarmasin Utara	74.136	75.306	149.442
6371 Kota Banjarmasin	333.236	332.987	666.223

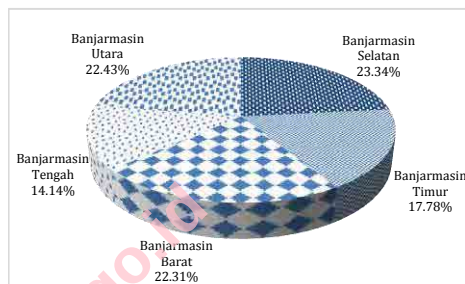
Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Ditinjau dari pola distribusi penduduk, persentase distribusi bervariasi antar kecamatan dari yang terendah sebesar 14,14 di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang luasnya 6,8 persen dari luas seluruh Banjarmasin hingga yang tertinggi sebesar 23,34 persen di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang merupakan kecamatan terluas di Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan kecamatan kedua terbesar distribusi penduduknya dengan populasi 149.442 orang, dimana di kecamatan tersebut pengembangan perumahan/ pemukiman penduduk yang cukup pesat. Dengan luas 22,43 kilometer persegi (16,8 persen dari luas Banjarmasin), Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki kepadatan 14.145 jiwa per km², merupakan kecamatan terpadat di Kota Banjarmasin kemudian disusul Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara. Semakin padat suatu wilayah tentunya semakin menuntut perhatian yang lebih, sebab semakin tinggi kepadatan penduduk akan semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok seluruh penduduk, terutama perumahan karena luas lahan menjadi terbatas.

Berbeda dengan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang merupakan kecamatan terluas di Kota Banjarmasin hanya memiliki kepadatan 4.063 jiwa per kilometer persegi. Permasalahan juga timbul di wilayah yang kepadatannya sangat rendah, seperti besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk penyediaan berbagai macam fasilitas karena tempat tinggal penduduk yang tersebar. Salah satu kondisi yang mungkin terjadi misalnya, fasilitas pendidikan yang disediakan ada yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggal sebagian penduduk sehingga mungkin akan mengakibatkan penduduk tersebut kurang termotivasi untuk bersekolah.

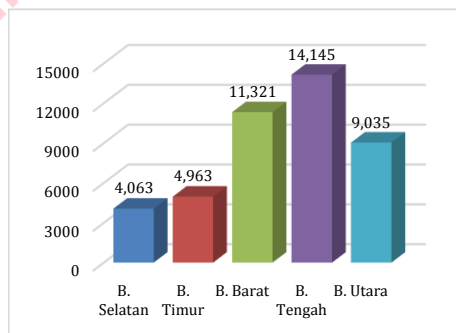
Ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk secara gender, sex ratio penduduk Banjarmasin hasil Proyeksi Penduduk 2014 adalah 100,07. Artinya jumlah penduduk laki-laki 0,07 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat menggambarkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kondisi sebaliknya terjadi di tiga kecamatan lainnya di mana rasio jenis kelaminnya kurang daripada 100 yang berarti penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 2.2 Persebaran Penduduk Banjarmasin, 2014



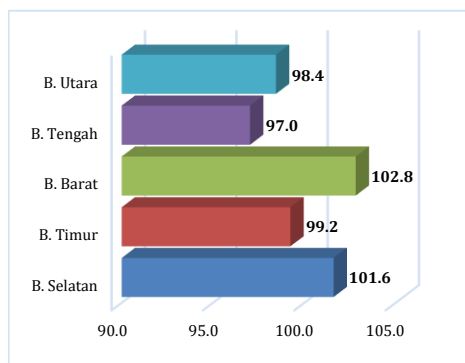
Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Gambar 2.3. Kepadatan Penduduk Banjarmasin Per Kecamatan, 2014



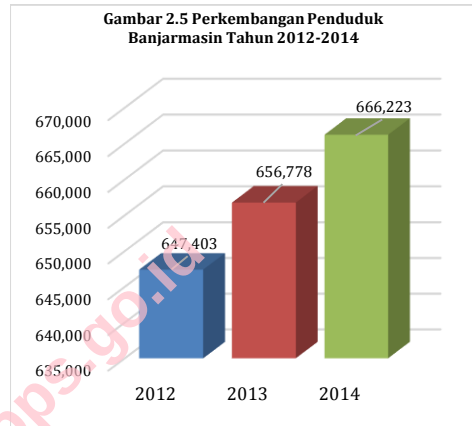
Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Gambar 2.4. Rasio Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk Banjarmasin 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Banjarmasin diatas LPP rata-rata Kalimantan Selatan. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan dalam hal peningkatan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan kesehatan maupun perumahan di masa mendatang.



Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Banjarmasin yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur muda, yakni kelompok umur 0-14 tahun Gambar 2.6. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Banjarmasin memiliki karakteristik *expansive* seperti digambarkan oleh piramida penduduk yang berbentuk limas dengan dasar yang melebar dan slope tidak terlalu curam. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Sementara jika ditinjau dari karakteristik pemusatan umurnya, maka umur median terletak pada usia 26 yang menunjukkan bahwa penduduk Banjarmasin termasuk kategori penduduk menengah (*intermediate*).

Gambar 2.6. Piramida Penduduk Kota Banjarmasin, 2014



Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Pada tahun 2014, 111.624 orang (16,75 persen) penduduk Banjarmasin berusia 10-19 tahun, yang berarti bahwa hampir seperlima penduduk merupakan penduduk usia sekolah. Besarnya jumlah penduduk pada kelompok umur ini perlu mendapat fokus dari pemerintah agar lebih memperhatikan bidang pendidikan terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung serta terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar/guru guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang layak bagi seluruh daerah terutama pada era globalisasi dan kemajuan teknologi. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan merupakan faktor utama pembentuk karakter manusia dan juga penopang dalam meningkatkan kualitas SDM untuk pembangunan bangsa.

Tabel 2.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	35 158	33 017	68 175	106,48
5 - 9	30 726	29 131	59 857	105,48
10 - 14	27 843	26 658	54 504	104,46
15 - 19	28 031	29 089	57 120	96,36
20 - 24	31 320	32 360	63 680	96,79
25 - 29	30 076	29 423	59 499	102,22
30 - 34	29 063	29 353	58 416	99,01
35 - 39	27 593	27 886	55 479	98,95
40 - 44	25 344	25 255	50 599	100,35
45 - 49	20 804	21 174	41 978	98,25
50 - 54	17 019	16 693	33 712	101,95
55 - 59	13 438	12 515	25 953	107,38
60 - 64	7 420	7 372	14 792	100,65
65 - 69	4 812	5 472	10 284	87,94
70 - 74	2 568	3 609	6 177	71,16
75+	2 018	3 980	5 998	50,70
Kota Banjarmasin	333 236	332 987	666 223	100,07

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

Tabel distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan 182.536 orang (27,40 persen) berusia muda (usia di bawah 15 tahun); 461.228 orang (69,23 persen) berusia produktif (umur 15-64 tahun) dan hanya 22.459 orang (3,37 persen) lansia yang berumur 65 tahun lebih. Persentase penduduk usia muda yang tinggi dapat menjadi beban yang berarti bagi penduduk usia produktif. Semakin besar

Tabel 2.3. Rasio Ketergantungan, 2014

Indikator	Rasio
(1)	(2)
Rasio Ketergantungan	44,45
Rasio Ketergantungan Muda	39,58
Rasio Ketergantungan Tua	4,87

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Hasil Proyeksi Penduduk

proporsi penduduk usia muda, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif memperlihatkan perlunya perhatian dari pemerintah dalam hal persiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa mendatang.

Berdasarkan angka total diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 44,45 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang usia tidak produktif. Atau, lebih rinci lagi diperoleh angka ketergantungan muda (*young dependency ratio*) sebesar 39,58 dan angka ketergantungan tua (*old dependency ratio*) sebesar 4,87. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 39-40 orang usia muda tidak produktif dan 4-5 lansia tidak produktif.

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki hampir pada setiap kelompok umur lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun pada kelompok umur tua (55+) akan terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dibanding penduduk laki-laki.

2.2. KOMPOSISI PENDUDUK

Tabel 2.4. memperlihatkan komposisi penduduk menurut status perkawinan. Dalam demografi, status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Lebih dari separuh penduduk Banjarmasin (56,11 persen) berstatus kawin. Besarnya angka perkawinan ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu lebih mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga, perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi, dll.

Dari Tabel 2.4 juga terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (38,83 persen) lebih besar dibanding perempuan (32,19 persen), yang berarti bahwa penduduk perempuan cenderung lebih cepat melepas status lajangnya. Sementara itu, penduduk perempuan yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati (12,99 persen) jauh lebih besar dibanding penduduk

laki-laki (3,75 persen), yang berarti bahwa untuk penduduk perempuan yang berstatus cerai cenderung untuk memilih tetap dalam statusnya meskipun harus menanggung beban sebagai kepala rumah tangga, dengan kata lain perempuan tanpa pasangan umumnya fokus untuk mengurus rumah tangga dan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2014

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
Belum Kawin	38,83	32,19	35,47
Kawin	57,42	54,82	56,11
Cerai Hidup	1,73	3,69	2,72
Cerai Mati	2,02	9,30	5,70
Kota Banjarmasin	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Perkawinan usia dini akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari sisi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Program konseling maupun pelayanan kesehatan reproduksi remaja akan dapat dilakukan secara tepat apabila mengetahui berapa banyaknya dan dimana perkawinan usia dini terdapat. Tabel 2.5 mengindikasikan terdapat perkawinan dini di Banjarmasin walaupun dalam persentase yang relatif kecil, yakni pada kelompok umur yang relatif masih sangat muda (<20 tahun).

Sehubungan dengan isu tersebut, pemerintah pusat maupun daerah perlu menyiapkan program peningkatan usia kawin, program mempertahankan anak-anak usia sekolah agar tetap berada di bangku sekolah dan menunda perkawinan, dan penyuluhan perkawinan bagi pasangan pasangan muda.

Tabel komposisi penduduk menurut status dalam rumah tangga (Tabel 2.6) menunjukkan proporsi penduduk laki-laki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga adalah 45,72 persen yang hampir seluruhnya memiliki pasangan hidup, terlihat dari persentase penduduk yang berstatus istri 40,98 persen. Sementara itu terdapat 10,79 persen perempuan tanpa pendamping hidup yang mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur, 2014

Kelompok Umur	Status Perkawinan			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 – 19	60,18	1,50	2,11	0,00
20 – 29	30,68	17,39	25,91	1,87
30 – 64	8,84	77,88	71,98	57,25
65+	0,29	3,23	0,00	40,88
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Status dalam Rumah Tangga, 2014

Status Dalam Rumahtangga	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala rumah tangga	45,72	10,79	28,25
Istri/suami	0,08	40,98	20,53
Anak	46,16	38,58	42,37
Menantu	1,94	1,48	1,71
Cucu	3,22	3,31	3,27
Orang tua/mertua	0,51	1,39	0,95
Famili lain	2,37	3,38	2,87
Lainnya	0,00	0,09	0,04
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

<http://banjarmasinkota.bps.go.id>

KESEHATAN



BAB 3

KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dan penting dalam pembahasan kualitas hidup dan kesejahteraan suatu wilayah. Begitu pentingnya kesehatan dalam menentukan kesejahteraan, indikator kesehatan dijadikan beberapa tujuan dan target yang ingin dicapai pada *Millennium Development Goals*, antara lain Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015; Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015; Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2015; dst.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, kesehatan memberikan pengaruh pada produktivitas penduduk. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk diharapkan produktivitas pun akan semakin meningkat yang kemudian akan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan mutu, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan sampai wilayah pelosok yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat di masyarakat.

Keseriusan pemerintah pun ditunjukkan dengan semakin besarnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Realisasinya diantaranya dengan diluncurkannya pelayanan gratis bagi kelompok masyarakat miskin melalui program Kartu Indonesia Sehat atau Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda) serta perluasan cakupan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap yang berkomitmen agar pada 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Sehingga, diharapkan peningkatan derajat kesehatan penduduk Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun dapat tercapai, dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan.

3.1. DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

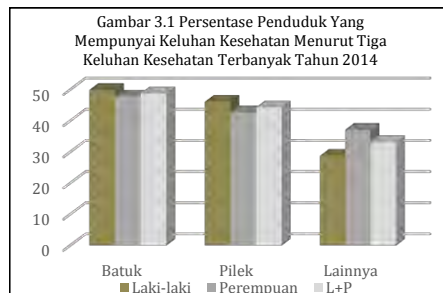
Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka morbiditas (*morbidity rate*). Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Tabel 3.1 Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk dengan keluhan kesehatan (persen)	29,16	34,38	31,16
Angka Kesakitan/Morbiditas (persen)	6,83	9,86	7,99
Rata-rata Hari Sakit (hari)	4,20	3,71	3,94

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Susenas 2014

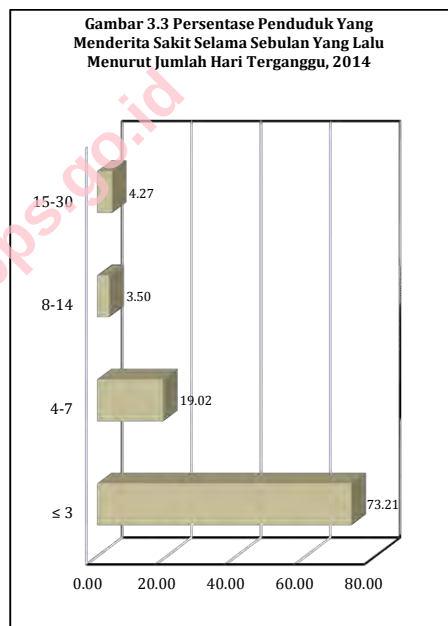
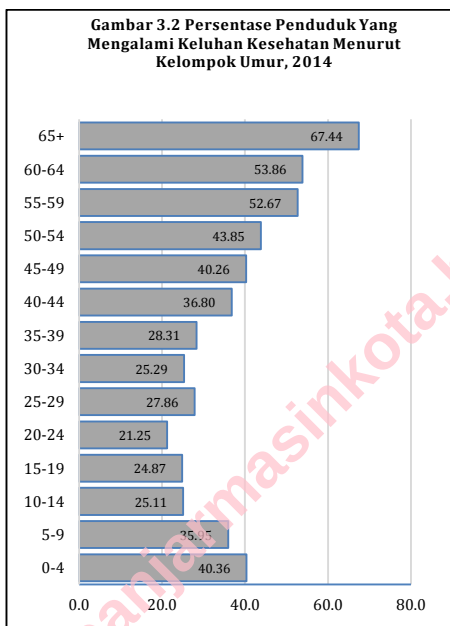
Pada tahun 2014, sebanyak 31,16 persen penduduk Banjarmasin pernah mengalami gangguan kesehatan sebulan terakhir dan 7,99 persen penduduk merasa terganggu aktivitas sehari-harinya dengan adanya keluhan kesehatan tersebut. Adapun jenis penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya berkisar pada penyakit infeksi saluran pernafasan seperti batuk dan pilek; serta keluhan lainnya misalnya lumpuh, pikun, stroke, mata katarak, dll.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Sementara rata-rata jumlah hari sakit penduduk Banjarmasin di tahun 2014 adalah 3-4 hari. Sebagian besar penduduk (73,21 persen) menderita sakit kurang dari 3 hari. Lamanya hari sakit yang relatif tidak terlalu lama ini diduga disebabkan oleh jenis penyakit ringan yang penyembuhannya tidak memerlukan waktu yang lama. Sementara keluhan hari sakit yang lama (lebih dari 2 minggu sampai dengan satu bulan) dialami oleh 4,27 persen masyarakat yang menderita sakit. Lansia yang lazim menderita lumpuh, stroke, dan mata katarak merupakan penduduk yang paling banyak mengalami

jumlah hari sakit yang relatif lama. Selanjutnya jika ditinjau lebih jauh menurut kelompok umur, maka di dalam kelompok umur masing-masing, balita dan lansia usia 50 tahun keatas merupakan yang paling rentan terhadap keluhan kesehatan seperti ditampilkan pada Gambar 3.2.



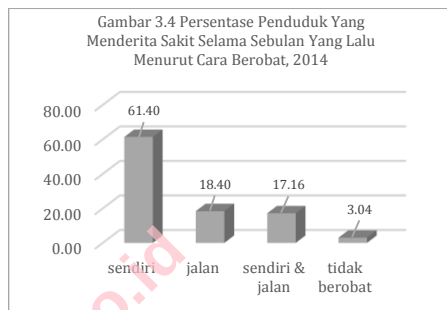
Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Susenas 2014

3.2. PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN

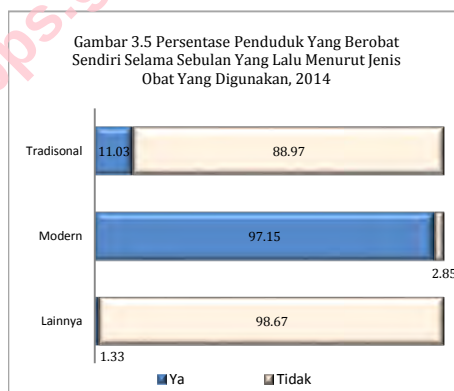
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan dan bahkan menyediakan pelayanan kesehatan gratis, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Upaya perbaikan kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat diketahui melalui informasi berupa indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dapat diukur dari persentase penduduk yang mengunjungi pelayanan kesehatan dalam upaya kuratif (berobat jalan) sebulan terakhir, yang disebut angka kontak.

Gambar 3.4 menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut cara berobat. Terlihat bahwa angka kontak (hanya berobat jalan serta berobat sendiri dan berobat jalan) sebesar 35,56 persen, berarti hanya sepertiga penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan telah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi keluhannya. Sementara 61,40 persen lebih memilih mengobati sendiri. Dari seluruh penduduk yang mengobati sendiri sebagian besar memilih obat modern seperti obat-obatan, dsj (96,81 persen), hanya sebagian kecil yang memilih mengobati secara tradisional seperti dengan ramuan/jamu-jamuan maupun dengan cara lainnya seperti pijatan atau kerokan. Secara keseluruhan terjadi peningkatan persentase penduduk yang menggunakan obat modern seiring dengan semakin mudah dan murahnya obat modern bisa didapatkan.

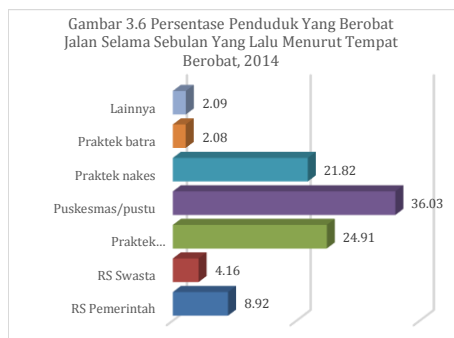
Sementara dari seluruh masyarakat yang berobat jalan, 36,03 persen mengunjungi Puskesmas atau Pustu, dibandingkan fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit atau dokter, Puskesmas/ Pustu lebih dipilih dikarenakan akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan tersebut lebih mudah dan menyediakan pelayanan kesehatan gratis di wilayah Banjarmasin.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

3.3. KESEHATAN BALITA

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dianggap lebih baik dibanding persalinan yang ditolong oleh dukun atau famili. Pertolongan dengan tenaga medis yang didukung tenaga terdidik seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya lebih menjamin keselamatan dalam proses kelahiran baik bagi ibu maupun bayi.

Tabel di samping menunjukkan persentase balita menurut tenaga penolong kelahiran, dimana penolong kelahiran dibedakan menjadi tenaga medis, dan non medis. Secara umum, penolong medis lebih banyak dipilih sebagai penolong kelahiran di wilayah Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat

Tabel 3.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir, 2014

Kelahiran	Kelahiran	
	Pertama	Terakhir
(1)	(2)	(3)
Tenaga Medis	97,46	97,46
Tenaga Non Medis	2,54	2,54
Jumlah	100,00	100,00

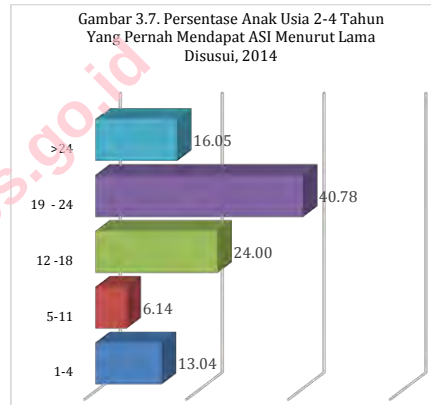
Sumber: Diolah dari Susenas 2014

untuk mengurangi resiko pada proses persalinan. Namun demikian, masih ada yang menggunakan tenaga dukun beranak sebagai penolong kelahiran. Keterbatasan biaya, kebiasaan setempat, dan di beberapa wilayah di Banjarmasin diduga menjadi faktor penyebab masih adanya pemanfaatan tenaga dukun ini walaupun dengan persentase yang relatif kecil. Bila ditengah proses persalinan ditemukan kendala, masyarakat menjadikan tenaga kesehatan terlatih sebagai tempat penolong terakhir kelahiran. Hal ini terlihat dengan naiknya peranan medis menjadi sebesar 97,46 persen sebagai penolong terakhir.

Salah satu faktor penting untuk perkembangan balita adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat perkembangan berat badan. Selain itu, ASI mengandung zat penolak atau pencegah penyakit serta dapat memberikan kepuasan dan mendekatkan hati ibu dan anak sebagai penjalin hubungan kasih sayang. Kandungan zat sempurna dalam ASI tidak dapat tergantikan oleh susu formula bahkan yang paling mahal sekalipun karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang diperlukan untuk memenuhi gizi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Pada umur 7-11 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi

karena mengandung lebih dari 60 persen kebutuhan bayi selain juga harus dilengkapi dengan makanan pendamping. Pada Umur 1 tahun keatas, meskipun ASI hanya bisa memenuhi 30 persen dari kebutuhan balita, akan tetapi pemberian ASI tetap dianjurkan karena baik untuk kesehatan. Bahkan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya ibu menyusui anaknya 2 tahun.

Pada 2014, sebanyak 96,7 persen balita di Banjarmasin telah mendapatkan ASI. Artinya tidak seluruh balita di Banjarmasin pernah disusui, hal ini menunjukkan semakin banyaknya penggunaan susu formula untuk bayi sejak lahir. Sementara rata-rata lama pemberian ASI bagi anak 2-4 tahun pada 2014 adalah 15,82 bulan. Artinya pada umumnya balita di Kota Banjarmasin disusui selama 1 tahun 4 bulan atau kurang dari 2 tahun. Dari populasi tersebut, sebagian besar (40,78 persen) disusui selama 19-24 bulan.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

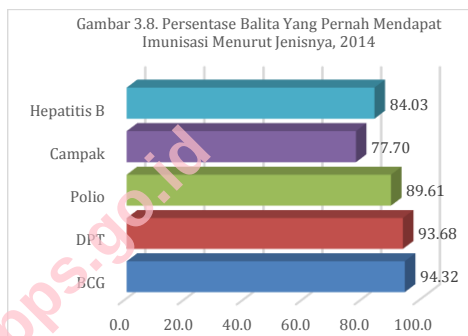
Menurut WHO, pemberian ASI tanpa makanan dan minuman pendamping (termasuk air putih, madu, air tajin, buah, dll) pada bayi berumur 0-6 bulan atau yang dikenal dengan istilah ASI eksklusif merupakan yang terbaik. Hal ini dikarenakan bayi baru memiliki sistem pencernaan relatif sempurna dan siap menerima makanan tambahan setelah usianya mencapai 6 bulan. Pemberian makanan dan minuman tambahan diluar ASI sebelum usia bayi mencapai 6 bulan juga dapat menyebabkan alergi dan obesitas bagi anak di kemudian hari.

Pada tahun 2014, rata-rata pemberian ASI saja bagi anak 2-4 tahun adalah 5,11 bulan atau kurang dari 6 bulan dan rata-rata pemberian ASI dengan makanan tambahan adalah 10,71 bulan. Hal ini mengindikasikan kesadaran dan pengetahuan para ibu menyusui akan pentingnya dan manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan anak masih belum maksimal sehingga perlu menjadi fokus bagi perencana di bidang kesehatan agar kedepannya lebih meningkatkan penyuluhan mengenai ASI eksklusif.

Selain melalui pemberian ASI, pencegahan penyakit sejak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan imunisasi pada balita. Imunisasi adalah pemberian suatu vaksin dalam tubuh

seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Sebenarnya ada banyak macam imunisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, namun hanya lima jenis yang diwajibkan.

Dari Gambar 3.8 dapat dilihat bahwa masih terdapat balita yang belum pernah diimunisasi walaupun dalam persentase yang tidak signifikan. Ini berarti bahwa imunisasi belum menjangkau semua sasaran, terutama untuk frekuensi yang dianjurkan (Tabel 3.3). Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih mengembangkan pelayanan imunisasi di antaranya dengan mengoptimalkan peran posyandu dan meningkatkan upaya dalam hal sosialisasi pentingnya imunisasi sebagai bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Orang tua juga harus mengetahui bahwa pemberian imunisasi aman bagi anak dan agar lebih memperhatikan jadwal pemberian imunisasi.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Tabel 3.3. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis dan Frekuensi Imunisasi, 2014

Jenis Imunisasi	Frekuensi Imunisasi		
	1	2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)
D P T	9,18	6,48	84,34
Polio	7,91	3,23	88,87
Hepatitis B	8,80	3,89	87,31

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

PENDIDIKAN



<http://banjarmasinkota.bps.go.id>

BAB 4

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

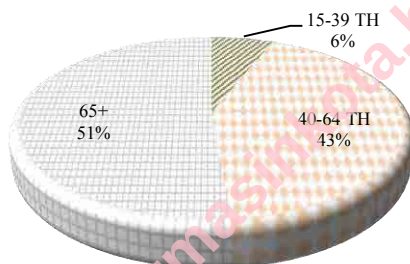
Begitu besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar mutu dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang efektif. Selain itu, diperlukan pemerataan kesempatan pendidikan yang layak dan menjangkau sampai wilayah terpencil, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menikmati dan mengenyam pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi, Angka Putus Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.

4.1. ANGKA MELEK HURUF

Kemampuan membaca dan menulis yang dicerminkan oleh indikator tingkat melek huruf merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Angka melek huruf merupakan perbandingan banyaknya penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Pencapaian angka melek huruf Kota Banjarmasin pada tahun 2014 adalah sebesar 99,04 persen.

Gambar 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, 2014



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Kelompok Umur, 2014

Kelompok Umur	Kemampuan Baca Tulis	
	Buta Huruf	Melek Huruf
(1)	(2)	(3)
15-39	0,10	9,90
40-64	1,19	98,81
≥65	10,27	89,73

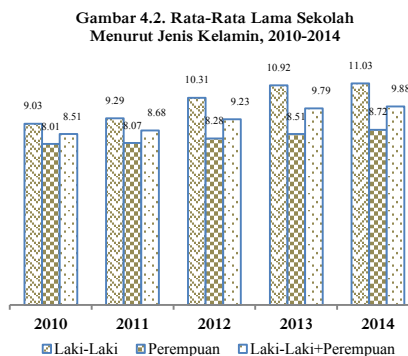
Sumber: Diolah dari Susenas 2014

4.2. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Banjarmasin adalah sekitar 9,88 tahun. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk 25 tahun ke atas baru dapat menjalani pendidikannya sampai kelas 1 hingga kelas 2 SLTA sederajat.

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 11,03 tahun dan penduduk perempuan sebesar 8,72 tahun, berarti rata-rata penduduk laki-laki menjalani pendidikannya sampai kelas dua hingga kelas tiga SLTA sederajat sedangkan penduduk perempuan secara rata-rata baru bisa menamatkan pendidikannya sampai kelas 2 hingga kelas 3 SLTP sederajat. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan pendidikan antar laki-laki dan perempuan yang relative besar. Hal ini diduga salah satunya karena di masyarakat berkembang paradigma perempuan tidak harus berpendidikan tinggi dibanding laki-laki.



Sumber: BPS RI, IPG dan IPM, 2010-2014

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

4.3. TINGKAT PENDIDIKAN

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

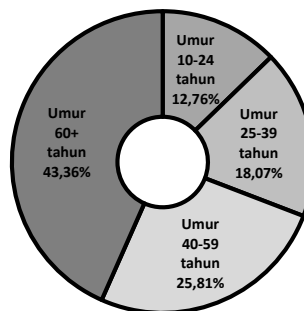
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Sekolah, 2014

Status Sekolah	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,57	2,09	1,34
Masih Sekolah	23,97	23,62	23,79
• SD/MI sederajat	6,53	6,21	6,37
• SMP/Mts sederajat	6,93	5,15	6,03
• SMU/MA/SMK sederajat	4,91	5,35	5,13
• Perguruan Tinggi	5,60	6,91	6,26
Tidak Sekolah Lagi	75,46	74,29	74,87

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Dari segi status sekolah, terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah, yakni sebesar 3,49 persen. Kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang dicanangkan pemerintah nampak mulai membuahkan hasil. Dan jika dilihat persentase menurut kelompok umur, maka dari seluruh penduduk 10 tahun keatas yang tidak pernah sekolah, ternyata sebagian

Gambar 4.3 Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah Menurut Kelompok Umur, 2014



Sumber: Susenas 2014, diolah

besar adalah penduduk usia 40 tahun ke atas (69,17 persen). Hal ini dikarenakan akses pendidikan pada beberapa puluh tahun silam masih sulit dan pada masa itu sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Sementara itu masih terlihat kesenjangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dimana proporsi penduduk perempuan yang tidak pernah sekolah relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

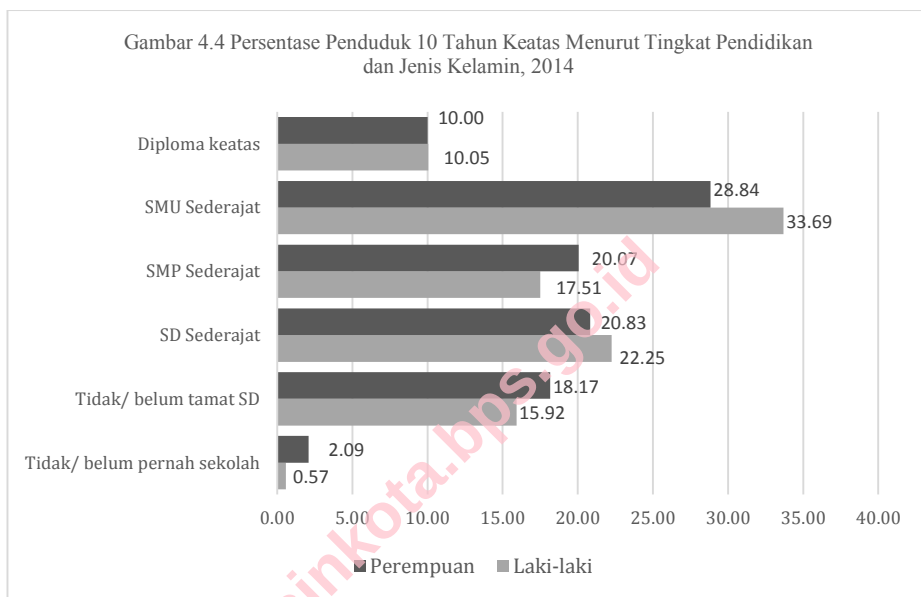
Selain status sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Perumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2014

Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	0,57	2,09	1,34
Tidak/belum tamat SD	15,92	18,17	17,06
SD Sederajat	22,25	20,83	21,53
SLTP Sederajat	17,51	20,07	18,80
SLTA Sederajat	33,69	28,84	31,24
Perguruan Tinggi	10,05	10,00	10,03

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Pada Tabel 4.3, penduduk Banjarmasin 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sekitar 1,34 persen, dan yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar relatif besar yaitu 17,06 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SD sebesar 21,53 persen dan SLTP sederajat sebesar 18,80 persen. Kemudian untuk yang berhasil menamatkan pendidikannya hingga SLTA sederajat sebesar 31,24 persen. Proporsi ini cenderung menurun untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan diploma keatas, yaitu sekitar 10,03 persen.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Dilihat dari sisi gender, pada seluruh jenjang pendidikan proporsi penduduk laki-laki yang berijazah/STTB cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian selisihnya tidak signifikan. Hal ini diduga salah satunya karena paradigma perempuan tidak harus berpendidikan tinggi dibanding laki-laki sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin kompetitifnya persaingan di bursa lapangan kerja. Sehingga menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pendidikan. Diharapkan kesadaran masyarakat ini terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

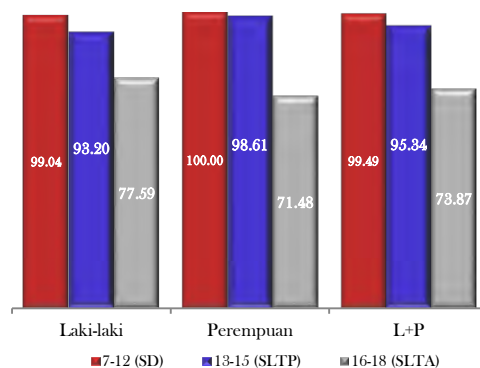
4.4. TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Banjarmasin telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka

Gambar 4.5.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 99 persen dan APS SMP lebih dari 95 persen. Pada tahun 2014, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,49 persen dan APS usia 13-15 tahun 95,34 persen.

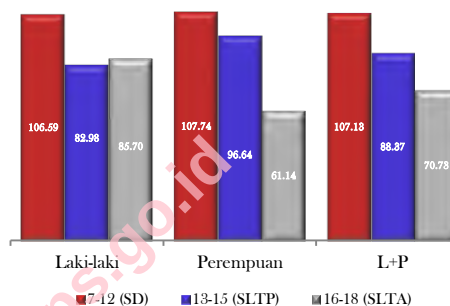
APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur terhadap jumlah anak dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2014, APK SD mencapai 107,13. Artinya pada tingkat sekolah dasar terdapat 107,13 persen penduduk yang bersekolah. Ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar daripada

jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 7,13 persen penduduk di luar usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD. APK penduduk Banjarmasin cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 88,37, bahkan pada jenjang SMU APK hanya mencapai 70,73. Kondisi ini juga umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Seperti halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Pada APM usia anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan

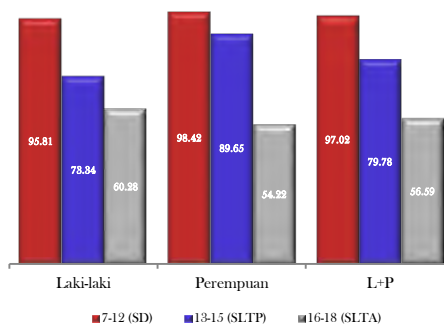
banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

Gambar 4.6.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Gambar 4.7.
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

4.5. ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat kegagalan penduduk untuk menyelesaikan pendidikan menurut jenjangnya. Indikator ini dapat mencerminkan tinggi rendahnya kualitas SDM di suatu wilayah. Salah satu penyebab makin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan adalah karena semakin tinggi suatu jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

Program Wajib Belajar 9 tahun di Banjarmasin masih harus menghadapi tantangan, yakni masih ditemukannya penduduk usia 7-12 tahun yang putus di jenjang SD (0,52 persen) dan penduduk usia 13-15 tahun yang putus di jenjang SLTP (1,43 persen). Di tingkat lanjutan atas, persentase sebesar 0,97 persen. Penyebab putus sekolah antara lain: rasa tanggung jawab mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga

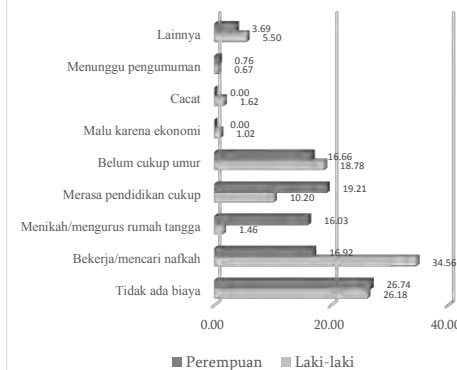
bagi laki-laki dan kewajiban mengurus rumah tangga bagi penduduk perempuan karena sudah berada dalam ikatan pernikahan, disamping itu 26,74 persen harus putus sekolah karena alasan biaya, 19,21 persen berhenti sekolah karena merasa pendidikan cukup, dan 16,92 persen tidak sekolah lagi karena bekerja/ mencari nafkah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau baik dari segi akses maupun biaya sehingga meningkatkan motivasi orangtua dan anak untuk tetap bersekolah.

Tabel 4.4 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD sederajat	0,97	0,00	0,52
SLTP sederajat	1,39	1,49	1,43
SLTA sederajat	0,00	1,60	0,97

Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Gambar 4.8. Persentase Penduduk 5-25 Tahun Menurut Alasan Terbanyak Putus Sekolah, 2014



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

<http://banjarasinkota.bps.go.id>

FERTILITAS



BAB 5

FERTILITAS

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

5.1 UMUR PERKAWINAN PERTAMA

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

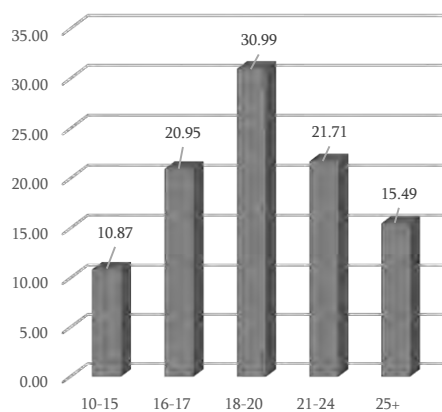
Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap risiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik bagi keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda

untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan dan kelahiran. Dalam hal kehamilan yang tidak dikehendaki karena usia calon ibu masih sangat muda, ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis. Pengguguran kandungan semacam ini dapat berakibat komplikasi aborsi. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan pertama melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Rata-rata umur kawin pertama (*Singulate Mean Age at Marriage/SMAM*) perempuan di Kota Banjarmasin pada tahun 2014 adalah 19,96 tahun. Artinya pada umumnya perempuan Banjarmasin mengakhiri masa lajangnya pada usia 19-20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kematangan usia kawin di kalangan wanita Banjarmasin sudah relatif baik. Sementara jika dikaitkan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat Perkawinan yang hanya mengizinkan suatu perkawinan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, maka usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun masih mengambil proporsi yang relatif tinggi, yakni 10,87 persen. Kemudian jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”, maka perkawinan pertama wanita 10 tahun keatas yang pernah kawin pada usia dibawah 18 tahun mencapai 31,82 persen.

Gambar 5.1 Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Keatas Menurut Umur Kawin Pertama, 2014



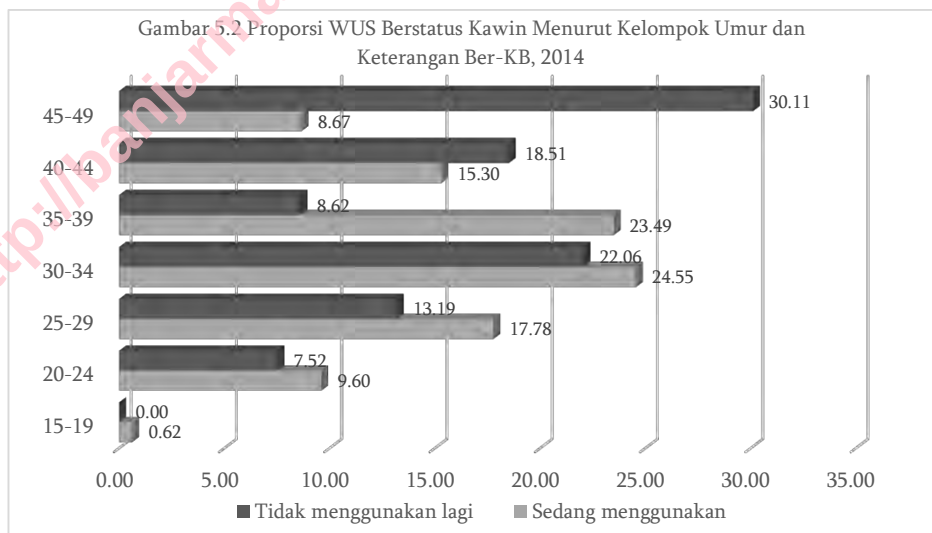
Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Kenyataan bahwa menikah muda masih menjadi pilihan utama bagi para wanita di Banjarmasin perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Umur yang muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah di usia muda masih panjang yang memungkinkan untuk mempunyai keturunan lebih banyak. Kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda (≤ 18 tahun) belum mencapai perkembangan yang

sempurna sehingga beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan saat persalinan. Namun di sisi lain menikah muda merupakan suatu pilihan karena adanya kekhawatiran sulit mendapatkan jodoh bagi para wanita yang dianggap sudah "berumur", disamping memang tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong cukup rendah. Kesulitan ekonomi juga cenderung mendorong orang tua mendesak anak wanitanya untuk lebih cepat menikah agar tanggung jawab terhadap kehidupan anak wanita tersebut ada pada suami.

5.2 PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA

Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS maka peluang banyaknya anak yang dilahirkan juga semakin besar. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga sejahtera.



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), yang salah satunya adalah melalui penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS. Penggunaan alat kontrasepsi mempunyai pengaruh terhadap jumlah anak yang dilahirkan. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin sebagian besar sudah pernah menggunakan alat KB dengan kisaran di atas 80 persen. Hal ini menunjukkan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam hal mengendalikan jumlah kelahiran anak melalui penggunaan alat kontrasepsi.

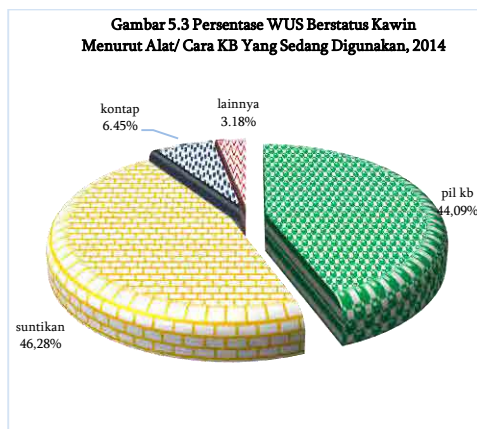
Hampir di semua kelompok umur terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal konsistensi pemakaian alat kontrasepsi. Keinginan memiliki anak pada PUS merupakan faktor yang paling mungkin mendasari keinginan pada wanita usia 15-49 tahun untuk tidak menggunakan/memakai alat KB.

Secara umum, besarnya persentase WUS berstatus kawin yang sedang menggunakan KB atau sebagai partisipan KB aktif adalah sebesar 73,43 persen. Partisipan aktif terendah ada pada kelompok umur tertinggi (45-49 tahun), yaitu 41,07 persen karena penduduk kelompok umur tersebut umumnya telah mendekati masa akhir reproduksinya sehingga banyak di antara mereka yang merasa sudah tidak perlu lagi menggunakan KB.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan tahun 2014 adalah Suntikan (46,28 persen) dan pil KB (44,09 persen). Kecenderungan memakai pil dan suntikan lebih tinggi karena kepraktisan, ketersediaan yang mencukupi, dan kemudahan untuk mendapatkannya.

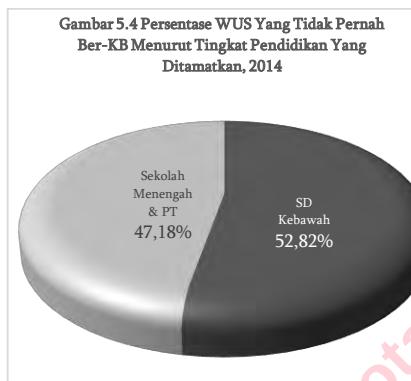
Dari hasil beberapa penelitian menyebutkan bahwa partisipasi KB banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang

WUS semakin tinggi pula kemungkinannya menjadi partisipan KB aktif dan sebaliknya. Dari data hasil Susenas 2014, terdapat 10,93 persen WUS berstatus kawin yang tidak pernah berKB. Sebagian besar

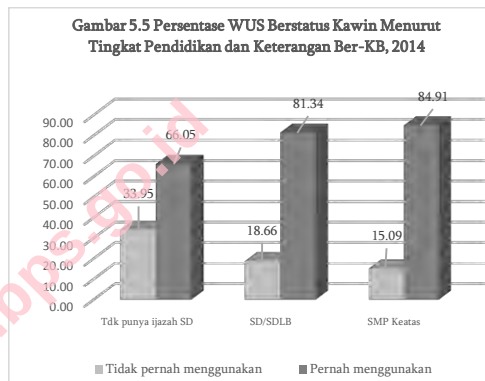


Sumber: Diolah dari Susenas 2014

(52,82 persen) dari yang tidak pernah berKB tersebut mempunyai tingkat pendidikan SD kebawah. Hasil ini semakin mempertegas dugaan bahwa tingkat pendidikan WUS sangat mempengaruhi partisipasi KB.



Sumber: Diolah dari Susenas 2014



Sumber: Diolah dari Susenas 2014

Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya ber-KB tetap diperlukan agar kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga laju pertumbuhan penduduk secara langsung dapat terkontrol dengan baik.

KETENAGAKERJAAN

<http://banjarasinkota.bps.go.id>



BAB 6

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan di seluruh tingkat wilayah. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi untuk aktivitas kegiatan ekonomi jika dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian, maupun keterampilan. Dengan demikian masyarakat akan menikmati kesejahteraan sebagai manfaat langsung dari pembangunan.

Secara umum, problematika ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah lain di Indonesia. Permasalahan itu berkaitan dengan tingkat pengangguran, jumlah jam kerja, dan kurang meratanya penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Akibatnya, beberapa sektor ketenagakerjaan yang potensial tidak berkembang secara optimal.

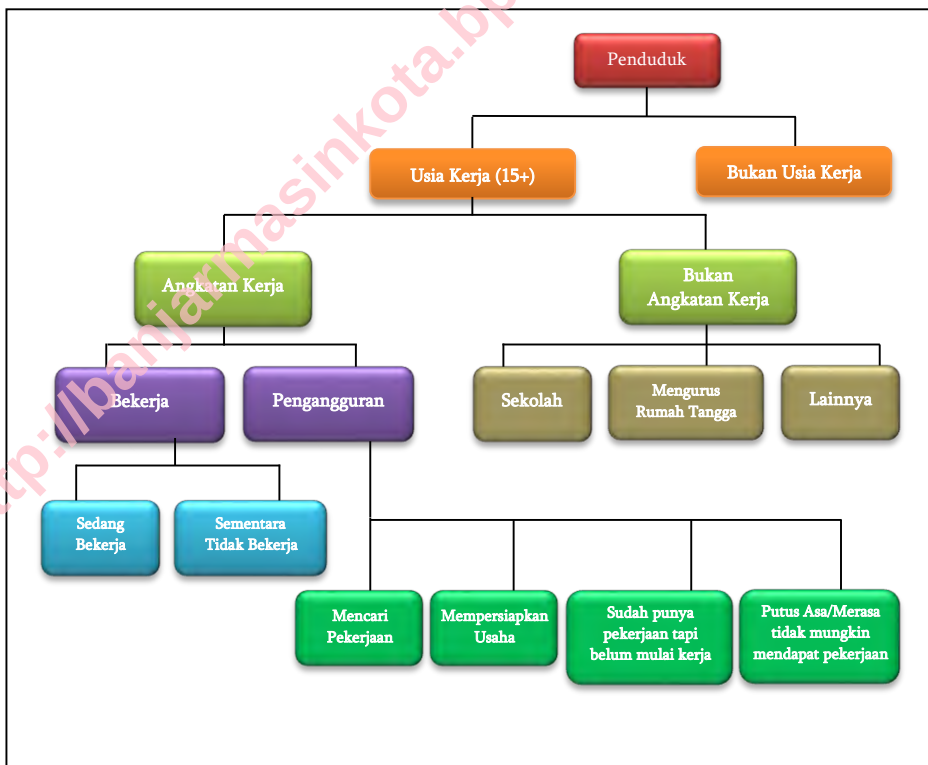
Untuk mengatasi problematika ketenagakerjaan saat ini dan masa mendatang, perlu disusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang terpola dan terpadu. Hal ini menuntut tersedianya data dan informasi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Banjarmasin. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap tahun berusaha memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan.

Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi dan menyediakan data dasar ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Melalui Sakernas berbagai informasi dan perkembangan ketenagakerjaan mampu lebih cepat terpantau, peka dan representatif. Diharapkan output Sakernas akan menjadi input yang bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam usaha mencapai kesejahteraan. Hasil Sakernas juga dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha sebagai masukan strategi persiapan usaha atau sebagai perencanaan pembangunan usaha.

6.1. PENDUDUK ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti: pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).

Gambar 6.1. Diagram Ketenagakerjaan



BPS dalam mengklasifikasikan seseorang berdasarkan kegiatan utama seminggu yang lalu menggunakan azas eksklusifitas. Dengan demikian, seseorang hanya digolongkan dalam satu kategori

saja. Penggunaan azas ini bertujuan untuk menghindari seseorang masuk dalam lebih dari satu kategori. Manfaat lainnya adalah dapat dilakukan keterbandingan data ketenagakerjaan antar periode. Azas eksklusifitas meletakkan prioritas utama keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, seseorang yang sedang berkuliah sambil bekerja hanya digolongkan dalam satu kategori, yaitu bekerja.

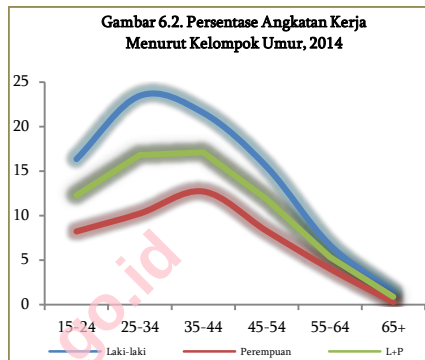
Tabel 6.1. Distribusi Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	6,56	4,18	5,36
20-24	9,80	4,06	6,91
25-29	9,47	5,51	7,47
30-34	14,00	4,74	9,33
35-39	10,83	6,75	8,77
40-44	10,73	5,97	8,33
45-49	7,10	3,91	5,49
50-54	8,41	4,38	6,38
55-59	4,38	2,86	3,61
60-64	2,32	1,19	1,75
65+	1,44	0,33	0,88
Jumlah	85,05	43,90	64,28

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Distribusi angkatan kerja penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hampir pada seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja penduduk perempuan hampir setengah daripada angkatan kerja laki-laki. Hal ini di antaranya disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi yang menempatkan penduduk laki-laki sebagai kepala keluarga atau anggota rumah tangga yang wajib mencari nafkah sehingga penduduk laki-laki lebih banyak sebagai angkatan kerja.

Ciri umum angkatan kerja di Kota Banjarmasin divisualisasikan pada Gambar 6.2 yang membentuk huruf U terbalik, dimana persentasenya rendah pada usia muda kemudian meningkat pada usia dewasa kemudian turun lagi pada usia yang lebih tua. Hal tersebut berkaitan erat dengan pendidikan bagi usia sekolah atau usia muda dan usia pensiun bagi yang sudah tua sehingga mereka keluar dari angkatan kerja.



Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (PAK)	85,05	43,90	64,28
- Bekerja	92,15	97,45	93,98
- Pengangguran (TPT)	7,85	2,54	6,02
Bukan Angkatan Kerja	14,95	56,10	35,72
- Sekolah	47,82	21,31	26,80
- Mengurus Rumah Tangga	8,45	74,40	60,73
- Lainnya	43,73	4,29	12,47
Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil pendataan Sakernas Agustus 2014, sebanyak 64,28 persen penduduk usia kerja di Banjarmasin merupakan angkatan kerja, sementara 35,72 persen sisanya bukan angkatan kerja. TPAK penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan, yaitu 85,05 persen laki-laki dan 43,90 persen perempuan.

Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Struktur umur mempengaruhi TPAK pada kelompok umur tertentu, demikian juga pendidikan. Status perkawinan mempengaruhi TPAK wanita, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Pertumbuhan ekonomi yang positif disemua sektor lapangan usaha, tentu saja akan menciptakan lapangan kerja baru.

**Tabel 6.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
15-29 tahun	74,90	36,26	54,48
30-49 tahun	96,86	52,33	75,22
50+ tahun	77,10	41,30	59,13
TPAK 15+	85,05	43,90	64,28

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.3 memberikan gambaran TPAK di Kota Banjarmasin berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Terlihat bahwa TPAK penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di hampir seluruh kelompok umur. Keadaan ini wajar terjadi seiring dengan budaya di masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai penopang nafkah keluarga yang utama. Pembagian tanggung jawab ini menjadikan perempuan sebagai istri lebih fokus untuk mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja.

Faktor lain selain umur dan jenis kelamin yang amat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tabel 6.4 mencoba menggambarkan distribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat pendidikan penduduk di Kota Banjarmasin. Terlihat kembali adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada sebagian besar tingkat pendidikan.

**Tabel 6.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014**

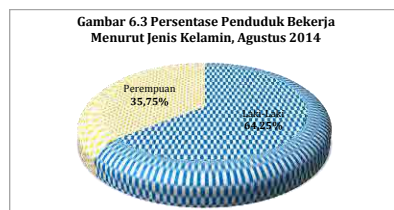
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	84,09	33,10	57,05
SD sederajat	88,09	43,33	64,68
SLTP sederajat	75,91	32,84	54,57
SLTA sederajat ke atas	83,50	53,00	70,98
TPAK 15+	85,05	43,90	64,28

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

TPAK tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA keatas (70,98 persen). Sedangkan TPAK terendah berada pada tingkat pendidikan SLTP, yaitu 75,91 persen untuk penduduk laki-laki, dan 32,84 persen untuk penduduk perempuan. Pada tingkat pendidikan rendah nampak bahwa angkatan kerja yang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha yang semakin kompetitif.

6.2. PENDUDUK BEKERJA

Penduduk bekerja di Banjarmasin pada umumnya didominasi oleh kaum pria. Pada tahun 2014, sekitar 64,25 persen penduduk bekerja adalah penduduk laki-laki. Persentase ini lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan bekerja yang sebesar 35,75 persen.



Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Sementara untuk melihat keterlibatan penduduk suatu wilayah dalam dunia kerja, digunakan indikator rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2014 rasio jumlah penduduk bekerja di Banjarmasin mencapai 60,41 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 60-61 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas telah bekerja. Rasio tertinggi penduduk bekerja berada

pada kelompok umur 30-49 tahun. Bahkan jika dilihat lebih lanjut menurut gender pada kelompok umur tersebut, maka rasio penduduk laki-laki yang bekerja mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh laki-laki pada kelompok umur 30-49 tahun telah bekerja. Hal tersebut berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah bagi laki-laki dewasa.

Tabel 6.5 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
15-29 tahun	61,30	33,32	46,52
30-49 tahun	93,39	52,33	73,44
50+ tahun	74,96	41,30	58,07
Jumlah	78,37	42,78	60,41

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

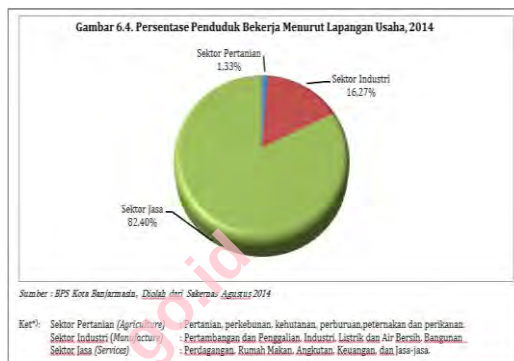
Jika ditinjau berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka seperti yang disajikan pada Tabel 6.6, kurang dari setengah (48,50 persen) penduduk Banjarmasin yang bekerja tahun 2014 berijazah SLTA. Hanya sepersepuluh penduduk bekerja yang tidak sekolah/ tidak tamat SD. Ditinjau lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, maka terlihat bahwa pada tingkat pendidikan SMP dan SLTA keatas didominasi pekerja perempuan, sedangkan pada pendidikan SMP pekerja laki-laki lebih banyak.

Tabel 6.6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2014

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	11,30	9,60	10,69
SD sederajat	22,76	22,99	22,84
SLTP sederajat	18,58	16,90	17,98
SLTA sederajat ke atas	47,37	50,52	48,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Sementara komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama disajikan pada Gambar 6.4. Distribusi sektoral penyerapan menunjukkan bahwa 4/5 pekerja di Banjarmasin memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor Jasa (82,40 persen). Sementara sektor Industri dan Pertanian menyerap tenaga kerja masing-masing



16,27 persen dan 1,33 persen. Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebagai bagian dari kelompok sektor Jasa menyerap 42,15 persen tenaga kerja. Hal ini seiring dengan kontribusi sektor ini pada PDRB Kota Banjarmasin yang merupakan terbesar kedua yakni 14,9 persen.

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, maka terlihat bahwa pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan pada seluruh kelompok lapangan usaha. Secara total, komposisi penduduk bekerja menurut sektor usaha dan jenis kelamin tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Namun jika dilihat menurut lapangan usaha utama nampak perbedaan signifikan pada kelompok sektor industri. Hal ini dikarenakan kelompok sektor industri didominasi sektor-sektor yang memiliki kecenderungan pengendalian kemampuan fisik selain kebutuhan skill.

Tabel 6.7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Sektor Pertanian (<i>Agriculture</i>)	89,54	10,46	100,00
Sektor Industri (<i>Manufacture</i>)	89,85	10,15	100,00
Sektor Jasa (<i>Services</i>)	58,79	41,21	100,00
Jumlah	64,25	35,75	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Pembahasan selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dalam ketenagakerjaan adalah status seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan. Permasalahan ini bisa dijadikan sebagai pencirian awal bentuk kegiatan perekonomian di suatu wilayah yang sedang berlangsung. Hal mendasar keterlibatan seseorang dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pengusaha (berusaha) atau sebagai pekerja (buruh). Secara umum BPS menggolongkan status pekerjaan menjadi seseorang berdasarkan status pekerjaan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar digolongkan ke dalam sektor formal, sedangkan yang berstatus selain itu umumnya digolongkan ke dalam sektor informal.

Hasil Sakernas 2014 memperlihatkan bahwa 50,34 persen pekerja di Banjarmasin berstatus buruh/karyawan/pegawai. Artinya lebih dari setengah pekerja adalah mereka yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini dikarenakan Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan sekaligus sebagai pusat perdagangan menjadi magnet bagi penduduk Kalimantan Selatan untuk bekerja di Banjarmasin sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Persentase terbanyak berikutnya antara lain penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri (22,00 persen), pekerja bebas (11,56 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (6,27 persen), pekerja keluarga/ tidak dibayar (5,99 persen), dan berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar (3,84 persen).

Tabel 6.8. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	12,73	9,26	22,00
Berusaha dibantu buruh tdk tetap/buruh tdk dibayar	4,13	2,14	6,27
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,06	0,78	3,84
Buruh/karyawan/pegawai	31,94	18,39	50,34
Pekerja bebas	9,52	2,04	11,56
Pekerja keluarga/tak dibayar	2,86	3,14	5,99
Jumlah	64,25	35,75	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Dengan demikian 54,18 persen pekerja di Kota Banjarmasin berstatus sebagai pekerja formal, dan sebagian, yakni 45,82 persen yang berstatus pekerja informal. Hal ini di antaranya dikarenakan kelompok sektor jasa yang menyerap sebagian besar penduduk bekerja di Banjarmasin pada umumnya mempekerjakan buruh/ karyawan/ pegawai. Hal ini semakin dipertegas oleh persentase penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang menunjukkan bahwa hampir 66,46 persen penduduk bekerja di Banjarmasin memiliki jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha penjualan, tenaga produksi, operator alat angkutan, dan lainnya.

Sementara untuk melihat optimalisasi para pekerja dalam lapangan usaha yang dilakukannya, digunakan indikator jumlah jam kerja keseluruhan. Persentase terbesar di Kota Banjarmasin adalah pekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal (35 jam) selama seminggu yang lalu, yaitu sebesar 71,09 persen. Tingginya persentase penduduk dengan jam kerja di atas 35 jam disebabkan sebagian besar penduduk bekerja di kelompok sektor jasa yang menuntut jam kerja yang tinggi. Jumlah pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari jam kerja normal selama seminggu sebesar 26,97 persen. Berdasarkan gender, terlihat bahwa yang memiliki jam kerja di atas 35 jam sebagian besar penduduk laki-laki. Sementara penduduk perempuan umumnya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Tabel 6.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan Utama	Jumlah
(1)	(2)
Formal	54,18
Informal	45,82
Jumlah	100,00

Sumber : Diolah dari Sakernas 2014 Agustus 2014

Tabel 6.10 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah
(1)	(2)
Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain ybdi,	
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan,	19,75
Tenaga Tata Usaha dan Tenaga ybdi	
Tenaga Usaha Penjualan	33,74
Tenaga Usaha Jasa	12,68
Tenaga Usaha Pertanian	1,10
Tenaga Produksi Operator Alat Angkutan dan	
Pekerja Kasar, dan Lainnya	32,72
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.11 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin, 2014

Jam kerja	Jenis kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sementara tidak bekerja	1,64	2,47	1,93
1 – 34	22,95	34,20	26,97
35-54	56,92	44,19	52,37
55+	18,49	19,15	18,72
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

6.3. PENGANGGURAN

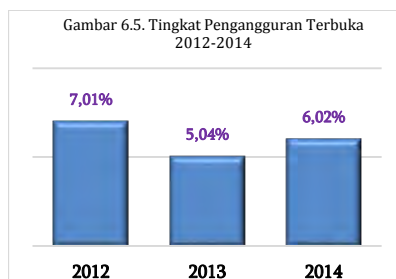
Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor penyebab *excess supply* tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan usahanya, angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha, tidak ada kecocokan upah, dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starters*). Perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dikenal dengan istilah pengangguran terbuka (*open unemployment*).

6.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kota Banjarmasin pada tahun 2014 adalah 6,02 persen, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berkisar 5,04 persen. Peningkatan angka pengangguran ini diduga disebabkan oleh kondisi perekonomian di Banjarmasin yang menurun sehingga berdampak pada pekerja maupun pengusaha.



Sumber : Diolah dari Sakernas 2012-2014

Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Banjarmasin termasuk yang paling besar. Besarnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Banjarmasin sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Selatan yang menjadi magnet bagi penduduk untuk mencari rezeki baik penduduk Banjarmasin ataupun dari luar Banjarmasin, sehingga persaingan untuk menjadi pengusaha atau pekerja menjadi tinggi. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yang rentan menjadi pengangguran dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil seperti sekarang ini.

Ditinjau menurut kelompok umur, TPT tampak tinggi pada kelompok usia muda (15-29 tahun), yakni mencapai kisaran 4,28 persen. Angka ini mengalami penurunan pada kelompok usia dewasa 30-49 tahun. Hal ini lebih disebabkan pada usia dewasa tersebut umumnya penduduk telah

memasuki jenjang perkawinan. Tanggung jawab secara ekonomi dalam rumah tangga menuntut seseorang untuk bekerja. Kondisi ini memaksa seseorang untuk tidak menjadi pengangguran terbuka. Sementara pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) terlihat bahwa 5,82 persennya berstatus pengangguran terbuka. Keberadaan pengangguran di kelompok usia produktif tentunya akan berdampak bagi proses pembangunan. Usia produktif seharusnya merupakan masa-masa potensial untuk berkreasi dan berkarya dengan optimal bagi masyarakat.

Sementara jumlah pengangguran yang pada umumnya mengelompok pada usia muda (15-29 tahun) diantaranya disebabkan mereka masih baru menyelesaikan pendidikan dan masih menjadi anggota rumah tangga dari orangtuanya. Dari seluruh pengangguran terbuka di Banjarmasin, sebagian besar merupakan mereka yang masih mencari pekerjaan (73,62 persen) dan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka (*discourage workers*) sebesar 20,30 persen.

Tabel 6.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2014

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
15-29	3,40	0,88	4,28
30-49	1,18	-	1,18
≥ 50	0,36	-	0,36
Jumlah	4,94	0,88	6,02

Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Gambar 6.6 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Penyebabnya, Agustus 2014



Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

6.3.2. Tingkat Pengangguran Terdidik

Salah satu penentuan kualitas SDM adalah pendidikan yang telah dicapai di samping keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah dicapai diharapkan akan semakin meningkatkan produktivitas penduduk. Hanya saja tidak semua penduduk yang telah mencapai suatu pendidikan mempunyai kesempatan untuk berproduktivitas.

Dari tabel di samping terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka yang tamat SD kebawah lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP keatas. Sementara tingkat pengangguran terbuka SMA ke atas secara keseluruhan berada pada kisaran angka 2,86 persen, yang berarti sekitar 2-3 orang dari 100 orang pengangguran terbuka merupakan pengangguran terdidik. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya kecocokan antara jenis pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan kurangnya kemauan wirausaha (*entrepreneurship*) bagi pengangguran terdidik.

Tabel 6.13 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tingkat Pendidikan	Persen
(1)	(2)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	0,44
SD kebawah*)	0,57
SMP	2,15
SMA keatas	2,86
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02

Sumber : Diolah dari Sakernas 2014

6.4. TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. TKK merupakan komplemen dari tingkat pengangguran terbuka. Tabel 6.15. memperlihatkan indikator TKK

Tabel 6.14 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	95,82
SD	97,41
SMP	88,72
SMA keatas	94,09
Jumlah	93,98

Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

penduduk Banjarmasin menurut kelompok umur. Nilainya secara total sebesar 93,98 persen yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kota Banjarmasin, sekitar 93-94 orang di antaranya telah terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada (bekerja atau sementara tidak bekerja).

Selain faktor usia, pendidikan yang ditamatkan seseorang juga turut mempengaruhi secara langsung kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang memiliki kompetensi yang lebih baik jika dibandingkan mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Namun di sisi lain, mereka dengan pendidikan tinggi cenderung lebih selektif untuk memilih pekerjaan dan rela untuk menganggur sampai pekerjaan yang dirasa sesuai dengan kompetensi.

Tabel 6.15 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kelompok Umur, Agustus 2014

Kelompok Umur	TKK
(1)	(2)
15-29	85,38
30-49	97,63
≥50	98,20
Kelompok Umur Produktif (15-64)	96,09
Jumlah	93,98

Sumber : Diolah dari Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.14 memperlihatkan bahwa penduduk Banjarmasin dengan pendidikan SMP justru memiliki kesempatan kerja yang lebih kecil bila dibandingkan dengan mereka yang hanya tamat SD ke bawah. Kenyataan ini tidak terlepas dengan jenis lapangan pekerjaan yang mayoritas tersedia di Banjarmasin sebagai buruh atau pekerja bebas yang tidak terlalu menuntut tenaga terdidik dan terlatih.

<http://banjarmasinkota.bps.go.id>

PERUMAHAN DAN TIK

BAB 7

PERUMAHAN DAN TIK

Lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik lingkungan fisik maupun sosial. Salah satu kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan lingkungan adalah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, selayaknya sebuah rumah memiliki bentuk fisik dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga dapat memperoleh hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas SDM.

Menurut Krieger dan Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan fasilitas terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan tersedianya pelayanan sosial.

Penilaian terhadap kondisi pemukiman suatu masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya: status penguasaan rumah tempat tinggal, rata-rata luas lantai perkapita, kondisi fisik rumah tempat tinggal, dan fasilitas apa saja yang dimiliki rumah penduduk.

7.1. PENGUSAHAAN TEMPAT TINGGAL

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Setiap orang memiliki hak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah. Yang dimaksud dengan hak menghuni tersebut dapat berupa hak milik, sewa, atau cara lain selain sewa. Berdasarkan status penguasaannya maka rumah dibedakan menjadi rumah milik sendiri, rumah sewa/kontrak, dan rumah lainnya, misal rumah bebas sewa atau rumah dinas.

Dari tabel di samping terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Banjarmasin menempati rumah milik sendiri. Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2014

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Persentase
(1)	(2)
Milik sendiri	52,12
Kontrak/Sewa	27,95
Bebas sewa	16,64
Lainnya	3,28
Jumlah	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

7.2. KONDISI RUMAH TEMPAT TINGGAL

7.2.1. Luas Lantai Tempat Tinggal

Luas rumah yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya yang juga mengindikasikan masih adanya penduduk yang hidup di bawah standar yang layak. Semakin tinggi tingkat status sosial suatu rumah tangga maka luas lantai yang dikuasai rumah tangga relatif semakin luas. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Rata-rata luas lantai per rumah tangga di Banjarmasin berdasarkan hasil Susenas 2014 adalah 56,11 m² dengan rata-rata luas lantai perkapita 18,53 m². Bila dibandingkan dengan standar tertentu, misalnya Kementerian Kesehatan yang menyatakan suatu rumah dikatakan sehat bila luas lantai perkapitanya minimal 8m², maka rata-rata luas lantai per kapita di Banjarmasin sudah memenuhi kriteria. Sedangkan menurut SK Menteri Perumahan Rakyat, luas

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Rumah Tangga, 2014

Luas Lantai (m ²)	Persentase
(1)	(2)
≤ 19	11,11
20-49	46,68
50-99	31,33
100-149	6,89
≥ 150	3,99
Rata-rata Luas Lantai per Rumah Tangga	56,11 m ²

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

lantai perkapita yang layak huni adalah $>7,2 \text{ m}^2$ dan menurut *American Public Health Association (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal 10 m^2 . Artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 4 orang, idealnya memiliki luas lantai minimal 40 m^2 .

Dari Tabel 7.3. dapat dilihat bahwa di Banjarmasin masih ada penduduk yang menghuni rumah tidak sehat dengan rata-rata luas lantai perkapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$ yakni sebesar 16,69 persen. Sedangkan bila yang digunakan syarat rumah sehat Kementerian Kesehatan maka persentase tersebut meningkat menjadi 18,43 persen, dan jika yang digunakan adalah ukuran *APHA*, maka ada sekitar 32,64 persen penduduk yang menghuni rumah dengan ukuran luas lantai per kapita yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Tabel 7.3 Persentase Luas Lantai Per Kapita Menurut Kriteria Rumah Sehat, 2014

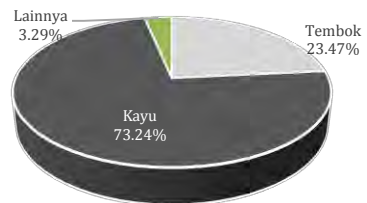
Luas Lantai per kapita (m^2)	Persentase
(1)	(2)
$\leq 7,2$	16,69
<8	18,43
<10	32,64
Rata-rata Luas Lantai per Kapita	18,53 m^2

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

7.2.2. Jenis Material Terluas

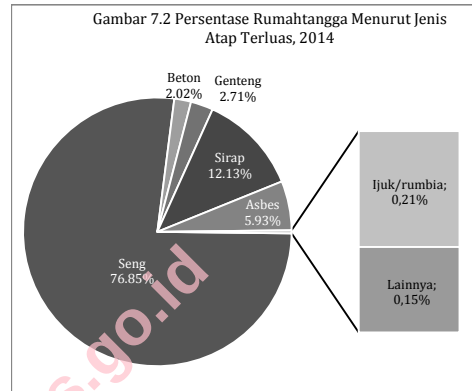
Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dilihat hanya dari luas lantai yang ditempati, namun juga ditinjau dari segi jenis material terluas yang digunakan karena pemilihan material untuk membangun tempat hunian merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Di sisi lain faktor budaya dan ketersediaan material yang melimpah juga turut mempengaruhi penggunaan material untuk perumahan. Kota Banjarmasin memiliki potensi bahan bangunan berupa kayu yang cukup besar karenanya kayu menjadi material dinding terbanyak (73,24 persen) yang dimanfaatkan oleh rumah tangga.

Gambar 7.1 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa macam bahan yang biasa digunakan sebagai atap, yaitu beton, genteng, sirap, seng, asbes, dan ijuk/rumbia, dan lainnya. Sementara untuk jenis atap terluas didominasi oleh material seng (termasuk genteng metal), yakni sekitar 76,85 persen. Sementara atap daun rumbia yang memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan genteng, seng, asbes atau sirap mengambil proporsi 0,21 persen.



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

7.3. FASILITAS PERUMAHAN

Tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, penerangan, bahan bakar memasak maupun pelayanan sosial.

Tabel 7.4 menunjukkan bahwa sumber utama air minum tahun 2014 didominasi oleh ledeng meteran (61,10 persen), kemudian diikuti oleh air isi ulang dan ledeng eceran. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih yang memenuhi kriteria seperti yang dicanangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) tujuan 7 yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup adalah 99,58 persen artinya 99-100 dari

Tabel 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, 2014

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
Air kemasan bermerk	3,12
Air isi ulang	21,52
Ledeng meteran	61,10
Ledeng eceran	13,42
Air sungai	0,84
Jumlah	100,00
Ruta minum air Bersih	99,58
Ruta Minum Air Layak	74,52

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

100 rumah tangga di Banjarmasin telah menggunakan air bersih untuk konsumsi sehari-hari, antara lain: *air minum kemasan/isi ulang, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.*

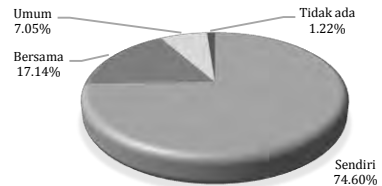
Sementara itu terkait dengan pencapaian MDGs Tujuan 7 target 10 yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan maka sumber air minum dibedakan menjadi air minum layak (*improved water*) dan air tidak layak (*unimproved water*). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak berdasarkan hasil Susenas 2014 adalah sebesar 74,52 persen, artinya 74-75 dari 100 rumah tangga di Banjarmasin telah mengakses air minum layak untuk konsumsi sehari-hari yakni air minum yang bersumber dari: *air ledeng, sumur bor/pompa, air hujan, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak $\geq$ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.*

Masih terkait dengan Indikator MDGs Tujuan 7 yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup, dapat dihitung indikator sanitasi layak berdasarkan hasil Susenas 2014, yaitu sebesar 73,3 persen. Artinya 73-74 dari 100 rumah tangga di Banjarmasin telah mengakses sanitasi layak, yakni ruta yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan kotoran.

Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga telah menggunakan listrik PLN meteran (99,95 persen), dan sumber penerangan lainnya sebesar 0,05 persen. Dengan demikian hampir semua rumah tangga di Banjarmasin telah mengakses penerangan listrik.

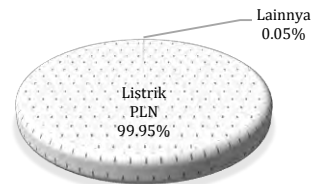
Ditinjau dari bahan bakar utama untuk memasak, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan gas/elpiji (55,85 persen) sebagai sumber energi utama memasak. Selain itu masih terdapat rumah tangga di Banjarmasin yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak (4,60 persen). Terkait dengan indikator MDGs mengenai kebutuhan bahan bakar biomassa WHO mendefinisikan biomassa sebagai bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan, sementara Kementerian Pertambangan

Gambar 7.3. Rumah tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

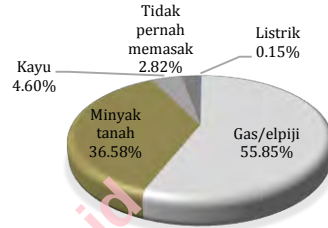
Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

dan Energi mendefinisikan biomassa adalah kayu bakar, arang, batu bara, sekam, batang padi, tandan kelapa dan tempurung kelapa (Laporan MDGs, Februari 2004) pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi manusia sehingga masyarakat secara perlahan dapat meninggalkan kayu bakar sebagai energi utama memasak. Selain itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak pembakaran bahan bakar padat sangat berbahaya bagi kesehatan karena memudahkan manusia terkena infeksi pernapasan. Bahaya dimungkinkan karena rumah di Indonesia rata-rata dirancang tanpa cerobong asap guna saluran pembuangan asap dan umumnya ventilasi dapur hanya berupa satu lubang di langit-langit atau dinding dapur.

Gambar 7.5 Persentase Rumah tangga Menurut Bahan Bakar Memasak, 2014



Sumber : Diolah dari Susenas 2014

7.4. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Ditinjau dari fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diakses rumah tangga, pengguna telepon kabel tahun 2014 adalah sekitar 8,24 persen. Angka ini relatif kecil, jika dibandingkan dengan angka pengguna telepon seluler yang mencapai 96,07 persen. Semakin pesatnya kemajuan telepon seluler yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk kamera, *games*, penjelajahan di dunia maya, dll, menjadi alasan masyarakat lebih memilih telepon seluler sebagai alat komunikasi.

Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Pengguna Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2014

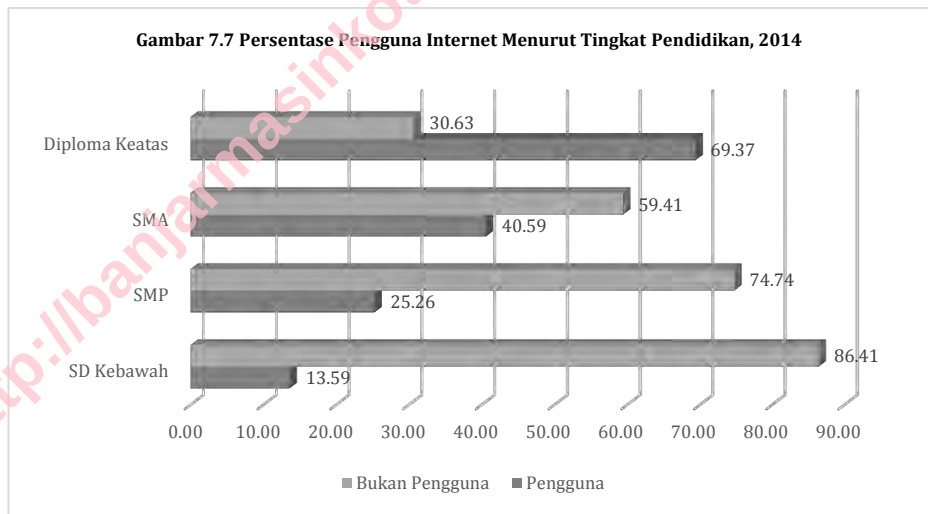
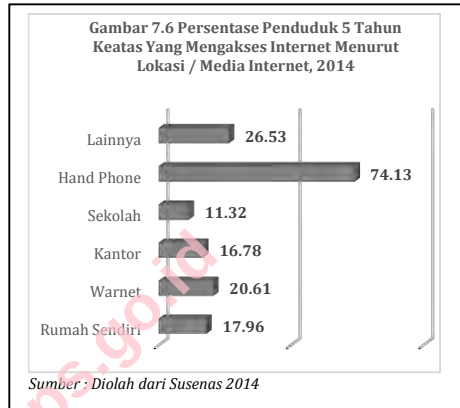
Penggunaan TIK	Persentase
(1)	(2)
Telepon rumah	8,24
Telepon seluler	96,07
Desktop/PC	6,58
Laptop/Notebook	31,62

Sumber : Diolah dari Susenas 2014

Penggunaan HP sebagai media akses internet pun mengalami peningkatan. Di tahun 2014, dari seluruh pengguna internet usia 5 tahun keatas, sekitar 74,13 persen mengakses melalui media HP. Potensi pengguna internet yang relatif besar ini bisa menjadi motivasi bagi dunia bisnis telekomunikasi untuk memperluas jangkauan akses internet yang masih terbatas sampai di beberapa wilayah di Banjarmasin yang belum terjangkau layanan internet.

Sementara penggunaan internet di sekolah mencapai 11,32 persen. Angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan banyaknya penduduk berstatus masih bersekolah yang mencapai 18 persen dari total penduduk Banjarmasin. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana akses internet di dunia pendidikan memegang peranan penting untuk peningkatan akses TIK ini demikian halnya dengan peningkatan

kualitas pengajar di bidang TIK. Ditinjau menurut tingkat pendidikan, persentase pengguna TIK meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan seperti ditampilkan gambar berikut.



KONSUMSI/ PENGELUARAN

<http://banjarmasin.kota.bps.go.id>



BAB 8

KONSUMSI/PENGELUARAN

Pola pengeluaran konsumsi penduduk merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk digunakan dalam setiap survei, karena sulitnya untuk memperoleh data tentang penghasilan/pendapatan penduduk dan ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi, penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan.

Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Bulan, 2014

Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp)	Persentase
(1)	(2)
< 1.000.000	2,53
1.000.000 – 1.999.999	27,13
2.000.000 – 2.999.999	29,56
≥ 3.000.000	40,78
Jumlah	100,00

Sumber : Susenas 2014. Diolah

Tabel 8.2. Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2014

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase
(1)	(2)
< 300.000	1,75
300.000 – 499.999	17,82
500.000 – 749.999	23,53
750.000 – 999.999	19,43
≥ 1.000.000	37,47
Jumlah	100,00

Sumber : Susenas 2014. Diolah

Dari hasil Susenas 2014, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan di Banjarmasin paling banyak berada pada kelompok pengeluaran Rp3.000.000,- keatas. Pada kelompok ini terdapat sekitar 40,78 persen rumah tangga (Tabel 8.1). Sementara modus pengeluaran per kapita per bulan berada pada golongan lebih dari Rp 1.000.000,- dengan persentase sebesar 37,47 persen (Tabel 8.2).

Ditinjau dari perkembangannya, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk per bulan untuk Kota Banjarmasin secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, pengeluaran perkapita/tingkat daya beli—yang telah disesuaikan dengan standar harga beli nasional—meningkat dari Rp626.510 pada tahun 2013 menjadi Rp629.420 pada 2014. Pemerintah

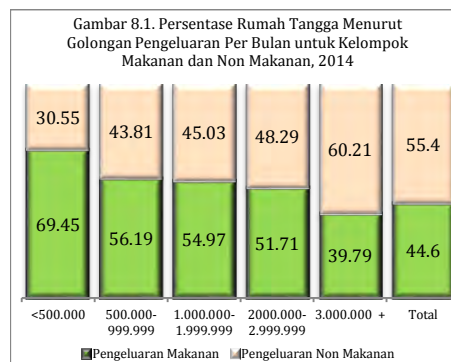
Kota Banjarmasin masih terus mengupayakan penyediaan berbagai fasilitas di berbagai bidang sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan dengan indikator meningkatnya konsumsi/pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Peningkatan konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan karena ada suatu teori yang menyatakan bahwa *semakin besar pengeluaran kelompok bukan makanan menunjukkan bahwa semakin sejahtera rumah tangga tersebut, sebaliknya semakin kecil pengeluaran kelompok bukan makanan menunjukkan bahwa semakin tidak sejahteranya rumah tangga tersebut* (Engel's Law).

Di lingkungan masyarakat Banjarmasin pada umumnya pengeluaran untuk non makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2014, pengeluaran rumah tangga untuk non makanan mencapai 55,40 persen sedangkan untuk makanan sebesar 44,60 persen.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Bulan untuk Kelompok Makanan dan Non Makanan, 2014

Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp)	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan
(1)	(2)	(3)
<500.000	69,45	30,55
500.000 - 999.999	56,19	43,81
1.000.000 - 1.999.999	54,97	45,03
2000.000 - 2.999.999	51,71	48,29
3.000.000 +	39,79	60,21
Rata-Rata	44,60	55,40

Sumber : Susenas 2014, Diolah



Sumber : Susenas 2014, Diolah

Kenyataan bahwa makan dan minum merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan, merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingginya persentase pengeluaran untuk makanan. Dari Tabel 8.3, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, maka semakin besar komposisi pengeluaran non makanan. Secara rata-rata bahwa kelompok pengeluaran rumah tangga di atas Rp3.000.000 per bulan mengeluarkan 60,21 persen untuk kebutuhan non makanan, sementara pada kelompok pengeluaran yang sama untuk kebutuhan makanan hanya sekitar 39,79 persen. Dari tabel juga terlihat bahwa rumah tangga pada kelompok pengeluaran dibawah Rp. 3.000.000,- pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi non makanan, Sesuai

dengan teori *Engel's Law*, perbaikan kesejahteraan secara umum perlu ditingkatkan dengan menyediakan bahan makanan dan non makanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, sehingga inflasi dapat dikendalikan secara berkesinambungan.

Tabel 8.4 Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Barang, 2014

Kelompok Barang	Persentase
(1)	(2)
Makanan	40,52
- Padi-padian	3,76
- Umbi-umbian	0,31
- Ikan/udang/cumi/kerang	4,46
- Daging	2,02
- Telur dan Susu	2,30
- Sayur-sayuran	1,70
- Kacang-kacangan	0,51
- Buah-buahan	1,99
- Minyak dan lemak	0,85
- Bahan Minuman	0,99
- Bumbu-bumbu	0,53
- Konsumsi lain	0,96
- Makanan & Minuman Jadi	14,37
- Tembakau & sirih	5,76
Non Makanan	59,48
- Perumahan	20,92
- Aneka Barang & Jasa, Transportasi dan Jasa Lainnya	9,27
- Biaya Pendidikan	4,83
- Biaya Kesehatan	2,83
- Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,88
- Barang Tahan Lama	6,06
- Pajak dan Asuransi	0,97
- Keperluan pesta	11,72
Jumlah	100,00

Sumber : Susenas 2014, Diolah

Ditinjau menurut kelompok barang, maka tingkat konsumsi penduduk Banjarmasin untuk kelompok makanan didominasi oleh kelompok makanan dan minuman jadi (14,37 persen). Konsumsi terbesar selanjutnya ada pada kelompok tembakau & sirih dengan besaran mencapai 5,76 persen dan kelompok Padi-padian (3,76 persen). Pola konsumsi ini lebih disebabkan karena faktor pendapatan dan kebiasaan masyarakat. Sementara pada kelompok non makanan, pembiayaan untuk perumahan dan fasilitasnya menjadi kelompok dengan persentase terbesar, yaitu 20,92 persen. Kelompok keperluan pesta menempati tempat selanjutnya dengan besaran 11,72 persen. Sementara biaya pendidikan dan kesehatan hanya mendapatkan porsi masing-masing 4,83 dan 2,83 persen dari total pengeluaran perkapita per bulan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARMASIN

Jln. Jafri Zam Zam No. 10 Banjarmasin

Telepon / Fax (0511) 3354178 Email : bps6371@bps.go.id

Website : <http://banjarmasinkota.bps.go.id>